

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan hutan di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma, di mana awalnya terlalu berbasis pada negara (*state based*), khususnya di era orde baru, menjadi pengelolaan yang berbasis pada masyarakat (*community based*), yang dimulai di akhir masa pemerintahan orde baru hingga saat ini. Paradigma pembangunan sumber daya alam hutan dengan pendekatan *community forestry* (kehutanan masyarakat). Sistem kehutanan masyarakat sebenarnya telah berkembang dengan baik di Indonesia dalam bentuk hutan rakyat, hutan adat, hutan desa maupun hutan kampung (Awang, 2003). Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan merepresentasikan pemikiran kehutanan masyarakat melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Sejak awal digulirkannya pada tahun 1995 hingga saat ini, program HKm mengalami berbagai perubahan peraturan demi perbaikan pelaksanaan di lapangan. Program HKm dilakukan di lahan hutan negara yang selanjutnya disebut lahan/areal HKm. Adapun peraturan yang mengatur tentang hutan kemasyarakatan yaitu dalam peraturan menteri kehutanan republik Indonesia Nomor : P.88/Menhut-II/2014 pasal 1 tentang ketentuan umum hutan kemasyarakatan.

Prinsip dari program HKm adalah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Masyarakat diberikan izin secara formal untuk mengelola lahan hutan negara melalui kelompok tani dan koperasi. Masyarakat dapat menanam tanaman pangan/MPTS di sela-sela tanaman kehutanan (kayu) dan kelak pada saat tanaman kayu sudah layak tebang, masyarakat akan mendapatkan manfaat bagi hasil kayu (khusus HKm kawasan hutan produksi).

Program HKm dilaksanakan baik pada kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Sesuai dengan fungsi masing-masing hutan, maka terdapat perbedaan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat

(Anonim, 2004). Pada HKm hutan produksi, masyarakat dapat melakukan enam poin kegiatan antara lain yaitu pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan berkayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Fandeli (2002), menyatakan bahwa hutan, apabila memiliki obyek alam yang menarik dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekowisata. Hal ini sesuai dengan kondisi hutan lindung yang berada di Desa Harogowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai hutan yang dijadikan sebagai obyek wisata alam yang sangat indah. Hutan Lindung yang memiliki nilai eksotis dengan ketinggian perbukitannya yang mencapai 450 meter diatas permukaan laut dan dapat melihat langsung pesona pemandangan indah waduk sermo dan alam yang masih hijau yang menjadikan hutan lindung ini dikelola untuk dijadikan ekowisata. dikelola oleh masyarakat kelompok Tani HKm Mandiri (KTHKm).

Keberadaan desa wisata Kalibiru tidak lepas dari hutan kemasyarakatan (HKm) Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. HKm yang dikelola kelompok tani Mandiri terbentuk berdasarkan partisipasi warga untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hutan dan untuk menjaga pasokan air bersih. Pariwisata menjadi alternatif pembangunan yang dilakukan warga untuk mempertahankan kelestarian lingkungan karena lokasi hutan yang mendukung dengan adanya nilai keindahan alam yang masih terjaga. Dalam penelitian ini penulis mengambil ekowisata Kalibiru sebagai tempat penelitian karena kalibiru masih dalam proses pengembangan. Selain itu penulis mengambil ekowisata Kalibiru sebagai tempat penelitian karena ingin mengetahui bagaimana proses hutan masyarakat di jadikan sebagai tempat ekowisata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengembangan ekowisata kawasan hutan kalibiru dengan skema hutan kemasyarakatan?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung strategi pengembangan ekowisata kawasan hutan kalibiru dengan skema hutan kemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis strategi pengembangan ekowisata kawasan hutan Kalibiru dengan skema hutan kemasyarakatan.
2. Menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung strategi pengembangan ekowisata kawasan hutan Kalibiru dengan skema hutan kemasyarakatan

D. Manfaat Penelitian

Dapat memberikan informasi yang jelas tentang gambaran tentang pengembangan ekowisata kawasan hutan kalibiru dengan skema hutan kemasyarakatan.